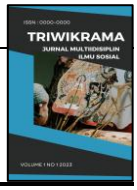
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH (SIBASAM) DALAM UPAYA PENURUNAN TIMBULAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA

Novia Eka Amelia [1], Kendry Widiyanto [2], Hasan Ismail[3]
[123] Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

noviaeka2003@gmail.com
kenronggo@untag-sby.ac.id
hasanismail@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Implementasi Program Sistem Informasi Bank Sampah dalam Upaya Penurunan Timbulan Sampah di Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan tingginya angka timbulan sampah di Kota Surabaya. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, khususnya melalui program bank sampah dengan adanya Program SIBASAM.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana implementasi Program SIBASAM yang diterapkan pada Bank Sampah Unit. Teori utama yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan Richard E. Matland yang mencakup empat prinsip: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakoptimalan program ini disebabkan oleh keterbatasan pada sistem dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikannya. Minimnya pelatihan, pendampingan, serta belum meratanya literasi digital memberikan dampak pada rendahnya pemanfaatan fitur-fitur penting dalam sistem SIBASAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan dan pengembangan sistem menjadi prioritas utama, Pelatihan teknis dan non-teknis harus diberikan secara berkala, baik dalam bentuk workshop, pendampingan langsung, maupun modul pembelajaran mandiri.

KATA KUNCI : Bank Sampah Unit, Implementasi Kebijakan, Sektor Publik, SIBASAM

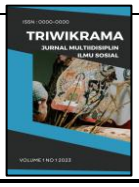
ABSTRACT

This study examines the implementation of the Waste Bank Information System Program in efforts to reduce waste generation in the city of Surabaya. The background of this study stems from the problem of high waste generation rates in the city of Surabaya. The government encourages the use of information technology to improve the effectiveness of waste management, particularly through the waste bank program with the SIBASAM Program.

The research uses a qualitative approach through interviews, observation, and documentation to gain an in-depth understanding of how the SIBASAM Program is implemented in the Waste Bank Unit. The main theory used is Richard E. Matland's Policy Implementation Theory, which includes four principles: Policy Accuracy, Implementation Accuracy, Target Accuracy, and Environmental Accuracy.

The results of the study show that the suboptimal performance of this program is due to limitations in the system and a lack of human resource skills in operating it. The lack of training, guidance, and uneven digital literacy have an impact on the low utilization of important features in the SIBASAM system.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



This study concludes that the need for system improvement and development is a top priority. Technical and non-technical training must be provided regularly, both in the form of workshops, guidance, and mentoring.

Keywords: Waste Bank Unit, Policy Implementation, Public Sector, SIBASAM

1. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada di sekitar kita yang memengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu, baik berupa benda, tenaga, maupun kondisi yang ada di dalam suatu tempat, tempat manusia atau makhluk hidup berada, serta dapat mempengaruhi kehidupan. Masalah lingkungan semakin hari semakin serius karena adanya dampak dari sampah yang semakin banyak. Sampah merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan kembali, memiliki nilai tambah, dan tidak merusak lingkungan.

Permasalahan sampah telah menjadi isu lingkungan yang kompleks dan mendesak di Indonesia, seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Setiap aktivitas manusia, baik di rumah tangga, perkantoran, maupun sektor industri, menghasilkan sejumlah besar timbulan sampah setiap hari. Tanpa sistem pengelolaan yang efektif dan terpadu, akumulasi sampah ini berpotensi besar menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, serta pencemaran air, tanah, dan udara.

Berdasarkan grafik tersebut Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah, sebagaimana diilustrasikan oleh perbandingan antara timbulan sampah dan volume penanganan dari tahun 2021 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa setiap tahun, volume sampah yang dihasilkan (timbulan sampah) secara konsisten jauh melebihi kapasitas atau upaya penanganan yang ada. Pada tahun 2021, timbulan sampah mencapai 4.068.911,99, sementara penanganan hanya 1.828.500,69. Kesenjangan ini terus berlanjut dan bahkan melebar pada tahun-tahun berikutnya, dengan puncak timbulan sampah mencapai 6.117.220,18 pada tahun 2023, berbanding 2.662.246,09 untuk penanganan. Meskipun ada sedikit penurunan timbulan sampah pada tahun 2024 (4.692.037,28) dan peningkatan penanganan (2.143.374,74), ketidakseimbangan ini tetap menjadi masalah krusial. (Kemenlh, 2025).

Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan belum dapat dikelola dengan baik, menimbulkan potensi risiko lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, latar belakang permasalahan ini adalah urgensi untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Jawa Timur guna mengurangi kesenjangan antara timbulan dan penanganan sampah, demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga.

Sibasam adalah aplikasi online resmi untuk mengintegrasikan database Bank sampah di Kota Surabaya, website ini dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya karena kurangnya optimalisasi sitem pencatatan serta buku Tabungan manual yang sering terjadinya kehilangan buku atau kesalahan pencatatan. Dengan adanya Sibasam ini akan dapat memudahkan pengelola maupun nasabah Bank sampah lebih mudah melakukan pengecekan dan pencatatan yang terintegradi internet, system Informasi Bank Sampah ini dapat memudahkan dalam proses pengawasan atau mengontrol serta membuat laporan secara Singkat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sibasam membawa dampak positif memfasilitasi Masyarakat dalam menyumbangkan sampah, mengintegrasikan teknologi untuk memonitor dan mencatat setiap penyetoran dengan efisiensi tinggi. Dengan demikian, implementasi program sistem informasi bank sampah di Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung penurunan timbulan sampah secara signifikan. Namun sayangnya tidak terlepas dari kurangnya literasi digital pengurus lansia di BSU dan masyarakat menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Berdasarkan fenomena permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan "Implementasi Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM) dalam Upaya Penurunan Timbulan Sampah Di Surabaya"

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (1969:80) sebagaimana dikutip oleh (Agustino Ph.D, 2022), Kebijakan merupakan serangkaian Tindakan atau kegiatan, sebagai Upaya yang selalu berhubungan denga usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, namun gagasan bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud adalah bagian terpenting dalam pengertian kebijakan. Sementara itu, menurut Anderson (1990:3) sebagaimana dikutip dari (Agustino Ph.D, 2022) kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk Tindakan. Dalam proses praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Pelaksanaan Keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang mengidentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan sasaran dan tujuan serta mengatur proses berjalannya implementasi. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses dengan mempertanyakan apakah proses berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu dengan melihat pada actionprogram dari individual projek dan apakah tujuan program tersebut telah tercapai.(Agustino Ph.D, 2022)

Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model implementasi yang dapat dijadikan pedoman atau penuntun agar saat proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun beberapa model implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. **Model Implementasi Van Meter dan Van Horn**
   Model Pendekaatan Top Down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn menawarkan enam indicator yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja. Model ini tidak hanya menentukan indicator kepentingan tetapi juga menjelaskan hubungan antara indicator-indikator. Model ini mengandaikan bahwa impelementasi kebijakan berjalan secara linier dari Keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan public. (Winarno, 2014)Ada enam variable, menurut van meter dan van horn yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public yaitu :

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
b. Sumber Daya
c. Karakteristik Agen Pelaksana
d. Sikap atau Kecenderungan (disposition) para pelaksana
e. Komunikasi antar- organisasi dan aktivitas pelaksana
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan politik

2. Model Implementasi Thomas B. Smith

Thomas B. Smith melalui kajiannya tentang model implementasi kebijakan, mengidentifikasi beberapa factor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun beberapa indikator yang ada dalam proses implementasi :

1.) Idealized Policy

pola interaksi yang didealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group untuk melaksanakan kebijakan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pemberian informası ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informası sama memberikan interprestasi yang bertentangan (conflicting), maka pelaksana kebijakan akan sulit terlaksana secara intensit. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikası kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinası komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementası kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

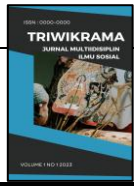
2.) Target Group

Target Group adalah bagian darı stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola intekasi yangg dunginkan. Mereka merupakan bagian darı stakeholders yang diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan terhadap pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan suatu proses implementası kebijakan dilihat darı bagaimana respon atau daya tanggap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan berhasil. Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau menyesuaikan dırı terhadap kebijakan yang dumplementasikan bergantung kepada:

a. kesesuaian isı kebijakan dengan harapan mereka

b. karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial ekonomi

c. komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran) sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan.



3.) Implementing Organizing

Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan. Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga pelaksana, maka pembahasan ini tidak lepas oleh struktur birokrası. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para lembaga pelaksananya. Pada beberapa kebijakan menuntut para lembaga pelaksana kebijakan agar bersikap ketat dan displin. Sedangkan pada konteks lain diperlukan lembaga pelaksana yang demokratis dan persuasit.

Model Impelementasi Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle sebagai mana dikutip dalam (Agustino Ph.D, 2022) keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian atau berdasarkan outcome yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin di raih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh Tingkat implementability yang terdiri atas isi Kebijakan dan implementasi kebijakan. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

a.) Kepentingan yang mempengaruhi

Suatu kebijakan dalam proses pelaksanaannya selalu dipengaruhi banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b.) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
Suatu kebijakan memiliki beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c.) Derajat perubahan yang diinginkan.
Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

d.) Kedudukan pembuat kebijakan.
Menjelaskan letak pengambilan Keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.

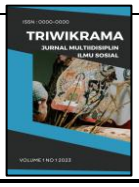
e.) (Siapa) pelaksana program.
Kebijakan dan program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan.

Model Implementasi Ricard Matland

Richard E. Matland (1995) mengembangkan Model Matriks Ambigusitas – Konflik yang menjelaskan bahwa Implementasi secara administrative adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan(Matland, 1995). Dalam Model ini terdapat dimensi-dimensi yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi terdapat 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan
   Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dan melihat bagiamana kebijakan tersebut

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



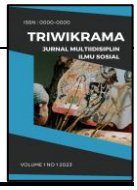
sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan melihat apakah kebijakan dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan
   Pelaksana kebijakan tidak hanya ada pada pemerintah namun juga terdapat Lembaga lain yang bisa menjadi pelaksana kebijakan yaitu Kerjasama antara pemerintah Masyarakat / swasta atau implementasi kebijakan yang di swasta kan. Adapun contoh Kebijakan yang diswastakan antara lain :
   a. Kebijakan yang bersifat monopoli seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derjat politik keamanan yang tinggi seperti pertahanan dan keamanan sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah.
   b. Kebijakan pemberdayaan Masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggungjawab pemerintah Bersama Masyarakat
   c. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan Masyarakat seperti bagaimana Perusahaan harus dikelola atau Dimana pemerintah tidak akan efektif melakukannya sendiri, seperti Pembangunan industry menengah dan industry kecil yang tidak bersifat strategis maka sebaiknya diserahkan pada Masyarakat.
3. Ketepatan Target
   Ketepatan target melihat apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan menghindari adanya tumpeng tinndih dengan intervensi atau program lainnya ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya
4. Ketepatan Lingkungan
   Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan sebagai variabel eksogen yang terdiri dari public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institusion yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan**.**(Sukowati et al., 2021)

METODE

Metode penelitian yang penulis pakai adalah metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa saja dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan tanpa menguji hipotesis. Metode penelitian kualitatif atau disebut penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagian instrumen kunci. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data lapangan mengenai Implementasi Program Sistem Informasi Bank Sampah dalam Upaya Penurunan Timbulan Sampah di Kota Surabaya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian "Implementasi Program Sistem Informasi Bank Sampah dalam Upaya Penurunan Timbulan Sampah di Kota Surabaya" ini ialah penelitian kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan kejadian yang terjadi sesungguhnya tanpa adanya rekayasa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif Cara ilmiah dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yng didasarkan terhadap ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisi Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data guna memudahkan penarikan Kesimpulan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian perlu dianalisis guna mendeskripsikan seluruh data sehingga peneliti dapat menyimpulkan dengan tepat. Analisis data bersifat subyektif berdasarkan pemahaman peneliti akan data yang ada. Data kualitatif dapat berupa gambar, teks dan aneka symbol. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif maka metode analisis data akan menggunakan Teknik dari Miles dan Huberman (1992:20) analisis interaktif adalah penggambaran dari tulisan, ucapan dan perilaku yang diamati dalam bentuk narasi.

1. Pengumpulan Data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, Dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai acuan untuk melakukan wawancara struktur, sedangkan wawancara tidak struktur apabila terdapat topik yang sekiranya penting untuk dibahas lebih lanjut. Kegiatan wawancara ini melibatkan Sttaf Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat dan Sub Koor Pengelola Bank Sampah Unit. Dokumentasi sendiri dilakukan oleh peneliti dengan mencari data statistik Timbulan sampah Di Kota Surabaya dalam website, data Bank Sampah di Kota Surabaya, data mitra Bank Sampah dan lain sebagainya. Sedangkan pada observasi sendiri, peneliti melakukan pengamatan terhadap keberlangsungan Implementasi Program Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM) dalam Upaya penurunan Timbulan sampah di Kota Surabaya.
2. Reduksi Data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya. Dalam tahap reduksi data, terdapat beberapa data yang perlu untuk digunakan dan tidak digunakan dalam artian dibuang karena tidak sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian Data. Dalam penelitian ini, setelah melakukan reduksi data selanjutnya ialah tahap penyajian data yang bertujuan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Penyajian data oleh peneliti dilakukan agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

4. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan penelitian diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh peneliti. Kesimpulan ini mencakup interpretasi peneliti terhadap data dan temuan yang dihubungkan dengan teori dan literatur yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan diambil untuk menentukan sejauh mana pengembangan potensi dan daya saing ekonomi lokal terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Proses verifikasi memastikan bahwa kesimpulan yang diambil akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

1. Gambaran Umum Instansi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada mulanya terbagi menjadi 2 antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Penggabungan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau terjadi pada tahun 2022. Hal ini sesuai arahan Kementrian Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dengan adanya penggabungan ini menyebabkan perombakan pada tatanan pemerintahan.

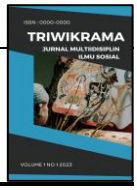
Dinas Lingkungan hidup Kota Surabaya merupakan leading sektor dalam menjalankan urusan pemerintah dibidang Lingkungan. Dinas lingkungan hidup berperan penting dalam setiap pengelolaan yang berdampak terhadap lingkungan dan pemulihan dampak lingkungan. Sebagaimana seharusnya DLH bertanggung Jawab terhadap lingkungan menjadi hal utama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berlokasi di Raya Menur No 31 A, Manyar sabrangan, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Jawa Timur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya bertugas dalam membantu Walikota Surabaya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Derah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan dapat ditemukan pada Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Selain itu Dinas lingkungan Hidup Kota Surabaya Memiliki Fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
4. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan bidang lingkungan hidup
5. Pengelolaan UPT
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai denggan lingkup tugas dan fungsinya



Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi tersebut dapat ditemukan juga pada kegiatan dan program yang masing- masing memiliki permasalahan pelayanan yang dipengaruhi oleh factor pendukung maupun penghambat. Adapun pada Penelitian ini berfokus pada Program Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM). Sistem Informasi Bank Smapah (SIBASAM) merupakan website Aplikasi yang didevelop oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Stakeholder yang didirikan mulai tahun 2019 dan rampung pada tahun 2022. SIBASAM ini didevelop untuk mengakomodir pelaporan perolehan omzet (Rp) dan Penimbangan (kg) seluruh Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di Kota Surabaya dalam rangka penghimpunan data yang akan dilaporkan pada kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI melalui Website SIPSN.

Bank Sampah Unit Kelurahan Mojo

1. Gambaran Umum Kelurahan Mojo

Kelurahan Mojo merupakan salah satu dari tujuh kelurahan yang berada di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan empat kelurahan yaitu Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Airlangga, Kelurahan Mayar Sabranagn dan Kelurahan Pacar Kembang. Kelurahan mojo terletak pada wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta aktivitas ekonomi Masyarakat yang beragam.

Berdasarkan Data yang ada Sebagian besar Bank Sampah yang berada di Kelurahan Mojo telah beradaptasi terhadap teknologi sehingga dalam proses administrasinya mengadopsi teknologi informasi seperti pada proses pendaftaran anggota, pencatatan data sampah, pelacakan pengumpulan dan pembukuan transaksi secara digital.

2. Bank Sampah “Kawan”

Bank Sampah Unit Kawan Surabaya adalah komunitas ditingkat RT yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penimbangan dan penjualan Kembali sampah kering yang mempunyai nilai harga dan dapat dijadikan penghasilan tambahan diantaranya seperti plastic, kertas, logam, kaca dan lainnya. Bank Sampah Unit Kawan yang bersekretariat di lingkungan RT 06 RW 12 yang beralamat di Jl. Jojoran Baru III No 30 tepatnya berada dirumah ibu HJ. Asri Hardini atau yang lebih sering kita sebut dengan nama ibu Jayadi.

3. Bank Sampah “Samboeng Oriep”

Bank Sampah Unit Samboeng Oriep merupakan salah satu unit bank sampah aktif yang berada dikelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Bank sampah ini di dirikan atas inisiatif warga dalam mendukung program pemerintah Kota Surabaya untuk menurunkan timbulan sampah melalui pengelolaan berbasis partisipasi warga.

Bank Sampah Unit Kelurahan Pacarkeling

1. Gambaran Umum Kelurahan Pacarkeling

Kota Surabaya merupakan Kota dengan angka kepadatan penduduk tertinggi se Jawa Timur dan juga menjadi kota dengan angka kepadatan penduduk diatas rata-rata dan paling tinggi dibandingkan dengan Kota dan Kabupaten Lainnya di Jawa Timur. Kota Surabaya memiliki 31

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Tambaksari sebagai wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Kecamatan Tambaksari memiliki 8 kelurahan dengan jumlah kepadatan penduduk tinggi, salah satunya adalah wilayah Kelurahan Pacarkeling.

2. Bank Sampah "Bugers"

Bank Sampah Unit Bugers Surabaya adalah komunitas ditingkat RT yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penimbangan dan penjualan Kembali sampah kering yang mempunyai nilai harga dan dapat dijadikan penghasilan tambahan diantaranya seperti plastic, kertas, logam, kaca dan lainnya. Bank Sampah Unit Bugers yang bersekretariat di lingkungan RT 04 RW 01 yang beralamat di Jl. Gersikan 6/17-A. Bank Sampah Unit "Bugers" dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki beberapa jabatan fungsional masing-masing dalam pencapaian tujuan.

Bank Sampah Unit Bugers termasuk kedalam salah satu unit bank sampah di Kelurahan Pacarkelingyang mulai diarahkan untuk mengadopsi system infromasi Bank Sampah. Denngan adanya Program SIBASAM dapat memudahkan pencatatan transaksi sampah diharapkan menjadi lebih akurat, transparan dan terintegrasi system DLH Kota Surabaya. Namun keberlanjutan dan optimalisasi penggunaan SIBASAM pada BSU Bugers perlu adanya pelatihan secara berkala dan dapat dimonitoring secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Aspek Geografi

Analisis terkait fenomena spasial dapat ditinjau melalui kondisi geografis suatu wilayah, termasuk interaksi antar wilayah dan interaksi manusia dengan lingkungan. Kondisi geografis mencakup lokasi, fisik wilayah, interaksi spasial yang saling bergantung, dan sebagainya. Identifikasi kawasan berdasarkan kondisi geografis dijadikan landasan untuk memahami keruangan wilayah, yang kemudian diterjemahkan sebagai hasil interaksi sosial dan fisik baik di dalam kawasan maupun dengan kawasan di sekitarnya. Pada aspek ini, kondisi geografis Kota Surabaya dirinci dalam tiga konsep utama yaitu lokasi, geofisik dan biofisik lahan, serta interaksi manusia dengan lingkungan.

Aspek Demografi

Dalam melakukan perencanaan, aspek demografi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan mengingat penduduk merupakan masyarakat di suatu wilayah yang akan menjadi subyek pembangunan kedepan. Oleh karenanya perencanaan pembangunan kedepan perlu memperhatikan dinamika penduduk di wilayah tersebut. Aspek demografi suatu wilayah merupakan aspek yang sangat fluktuatif, dimana perubahan dapat terjadi pada setiap tahunnya. Perubahan jumlah, struktur, maupun distribusi penduduk suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi) wilayah tersebut. Bagian ini akan membahas aspek demografi yang akan dibagi ke dalam jumlah penduduk, struktur penduduk, dan distribusi penduduk dari Kota Surabaya selama kurang lebih 20 tahun ke belakang.

Aspek Sosial

Kondisi sosial Kota Surabaya memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan timbulan sampah. Surabaya sebagai kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk yang

tinggi menghadapi tantangan sosial yang kompleks, mulai dari pola perilaku masyarakat dalam membuang dan memilah sampah, tingkat kesadaran lingkungan, hingga kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. faktor sosial merupakan salah satu determinan utama dalam efektivitas pengurangan timbulan sampah karena perilaku individu dan kolektif masyarakat sangat memengaruhi jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan setiap hari.

Penyajian Data

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang didapatkan di Lapangan dan diajukan ke dalam teks yang bersifat deskriptif tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Pada Bagian ini berisi tentang informasi yang didapat dilapangan. Informasi tersebut berupa dokumen, foto hingga mencatat peristiwa yang terjadi disaat penelitian. Informasi tersebut didapat dalam beberapa cara yakni observasi, wawancara dengan beberapa informan yang berhubungan dengan penelitian.

Penyajian ini dilakukan setelah reduksi keadaan di lapangan melalui wawancara, observasi yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dinas lingkungan Hidup Kota Surabaya Bersama membangun Kota yang bersih dan indah dengan berfokus pada pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang ada pada tiap-tiap wilayah baik RT maupun RW. Subjek yang ditanyakan juga berhubungan dengan penelitian ini informasi tersebut yaitu :

Pada kegiatan kunjungan mengimplementasikan menurut Richard E. Matland terdapat 4 prinsip yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang meliputi sebagai berikut :

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan

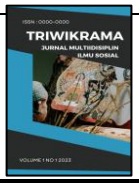
Peneliti menggunakan empat prinsip tersebut bertujuan untuk mengetahui Tingkat keberhasilan Implementasi Program Sistem Informasi Bank Sampah dalam Upaya penurunan timbulan sampah di Kota Surabaya. Dalam mengatasi permasalahan timbulan Sampah sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya, Lonjakan timbulan sampah diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kota Surabaya.

Hasil Penelitian

Ketepatan Kebijakan

Dalam Teori Implementasi Kebijakan menurut Richard Matland, model ini menjelaskan bahwa implementasi secara administratifadalah implementasi yang dilakukan sehari-hari dalam birokrasi pemerintahan. Ketepatan Kebijakan menurut teori Implementasi Richard Matland merupakan melihat sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, meninjau apakah kebijakan sudah sesuai dengan karakteristik masalah yang hendak dipecahkan dan melihat bagaimana Lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai dengan karakter dari kebijakan tersebut.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dapat dilihat bahwa Pemerintah telah berupaya dalam mengatur undang-undang dan peraturan daerah untuk menangani masalah pengelolaan sampah yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal 27 A telah dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan sampah perlu adanya pembentukan dan pendirian bank sampah sebanyak mungkin pada setiap daerah. Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan inovasi baru terhadap proses pengelolaan dan implementasi Bank sampah. Inoasi yang dikembangkan berupa aplikasi maupun web site Dimana hal ini dapat membantu dalam proses administrasi dan monitoring sehingga antara DLH dengan Bank Sampah Unit dapat terintegrasi. Inovasi ini adalah Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM).

Pembentukan Program SIBASAM ini dibentuk sebagai menfasilitasi para pemangku kepentingan seperti kelurahan, pengelola bank sampah unit dan nasabah bank sampah. SIBASAM ini telah mengalami perubahan dua kali karena adanya perbaikan dan penambahan fitur dalam aplikasi SIBASAM. Hal tersebut tercermin dari penjelasan informan instansi, yang menunjukkan bahwa pengelolaan timbulan sampah telah menjadi agenda prioritas daerah. Selain itu, informan juga menjelaskan Peran Pemerintah dalam proses pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, hal tersebut diperkuat oleh Bapak Deny selaku staff penyuluhan lingkungan hidup dan pemberdayaan Masyarakat adapaun dalam wawancara beliau menyatakan :

> " SIBASAM itu Tahun 2019 – 2021 adalah aplikasi versi pertama dan diperbarui lagi setelah ada maintenece tahun 2022 kemudian langsung di launching lagi versi kedua. Latarbelakang sibasam itu ada karena kita memfasilitasi untuk seluruh BSU / Bank sampah unit yang ada di RT / RW di setiap kampung itu agar mereka bisa melaporkan hasil perolehan tonase dan omzet yang mereka dapatkan kepada DLH Kota Surabaya. Nah setelah itu laporan tersebut akan kami kolase dan dilakukan pelaporan kepada Kementrian Lingkungan Hidup." (wawancara dilakukan pada 17 November 2025)

Pernyataan ini menunjukan bahhwa Pada Program SIBASAM ini bersifat Top Down Dimana kebijakan dibentuk bukan dasar dari keluhan Masyarakat melainkan suatu inovasi yang dibentuk untuk mempersingkat waktu dalam proses pengajuan SK bank Sampah Baru maupun Omzet yang didapatkan oleh nasabah dan pengelola Bank Sampah Unit. Namun informan juga menegaskan adanya Program SIBASAM ini dibentuk untuk mempermudah dalam proses operasional bank sampah. Pendapat dari Bapak Deny selaku staff penyuluhan lingkungan hidup dan pemberdayaan sekaligus pemegang program SIBASAM terkait tujuan dibentuknya Program SIBASAM bagi DLH selaku pembuat kebijakan, berikut pemaparannya :

> " Kendalanya selama ini kan, sebelum adanya Program SIBASAM DLH itu kita harus meminta satu persatu ke kontak person yang adaa. Nah laporannya tonaze misal bulan kemarin, bulan oktober itu dapat berapa kilo terus berapa omsetnya seperti itu akan memakan waktu." (wawancara Pada 17 November 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kendala waktu yang lama dalam proses pelaporan bank sampah sebelum adanya program ini. DLH kemudian melakukan perbaikan terhadap aplikasi sehingga pada SIBASAM versi kedua ini terdapat fitur baru yaitu pengajuan SK pembentukan bank sampah secara digital, sebelum nya pada aplikasi fitur pertama hanya sebagai pemantauan tonase dan omzet pada masing-masing bank sampah yang kemudian dilaporkan secara berkala kepada Kementrian Lingkungan Hidup. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dengan pernyataan Bapak Deny yaitu

> " di SIBASAM itu juga ada fitur yang namanya pengajuan SK pembentukan bank sampah secara Digital. Selama ini SK nya itu masih tanda tangan basah fisik ditanda tangani oleh kelurahan. Sebelum tahun 2021 itu ada peraturan kementrian permen itu SK diterbitkan oleh

> DLH. Tapi setelah adanya permen lhk sekitar tahun 2022. SK itu harus diterbitkan oleh Kelurahan setempat dimana BSU itu berdiri. Tapi kendalanya warga masih belum aware karena harus datang bolak balik ke kelurahan, jadinya di aplikasi itu juga difasilitasi untuk pembuatan pengajuan SK secara Digital. Nah jadi nanti tanda tangannya berbentuk Barcode. Kemudian SIBASAM ini juga memfasilitasi bagi pemangku wilayah/ kelurahan agar bisa memonitoring jumlah bank sampah unit yang ada diwilayah itu ada berapa, jadi semakin lebih cepat. Tentunya pihak BSU tersebut harus punya akun SIBASAM itu mereka yang membuatkan dari DLH, jadi harus request by WA." (wawancara Pada 17 November 2025)

Kejelasan kebijakan Program SIBASAM menunjukkan ketimpangan signifikan antara bank sampah unit yang mudah mengimplementasikan sistem dan bank sampah yang mengalami kesulitan sejak tahap pendaftaran. Pada bank sampah unit yang berhasil mengimplementasikan SIBASAM sejak awal, kebijakan ini jelas karena dengan adanya pemahaman yang memadai terhadap prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, serta alur verifikasi data. Pemahaman ini didukung oleh kapasitas kelembagaan yang lebih baik, termasuk keberadaan pengurus yang melek digital, ketersediaan perangkat teknologi, dan kedekatan koordinasi dengan bank sampah induk maupun Dinas Lingkungan Hidup.

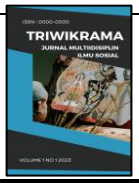
Sebaliknya, bank sampah unit yang mengalami kesulitan sejak awal pendaftaran memandang kebijakan SIBASAM sebagai instrumen yang kurang jelas dan membingungkan. Ketidakjelasan tidak hanya muncul dari dokumen kebijakan yang kurang rinci, tetapi juga dari kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang seharusnya diberikan secara intensif pada tahap awal. Banyak pengurus bank sampah yang tidak memahami tahapan pendaftaran digital, mekanisme validasi data, maupun peran masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tampak abstrak dan sulit diterapkan.

Kegagalan Program ini juga karena Aplikasi belum mampu mencakup seluruh proses transaksi, belum sepenuhnya user-friendly, dan belum menyediakan fleksibilitas input data yang dibutuhkan oleh pengelola. Dampaknya, pengurus harus melakukan penyesuaian manual yang mengurangi efektivitas digitalisasi, dan akhirnya menurunkan optimalisasi program dalam mendukung pengurangan timbulan sampah.

Perbedaan situasi implementasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan SIBASAM bukan hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh posisi kebijakan dalam matriks ambiguitas–konflik. Pada bank sampah dengan kapasitas tinggi, kebijakan dapat langsung dipahami karena tingkat ambiguitas rendah, sehingga implementasi berjalan berbasis aturan. Sementara pada bank sampah yang tertinggal secara kapasitas, kebijakan menghasilkan interpretasi yang beragam dan memerlukan adaptasi lokal yang besar. Analisis Matland menegaskan bahwa untuk mengatasi kesenjangan implementasi, pemerintah perlu menurunkan ambiguitas melalui peningkatan komunikasi kebijakan, standardisasi petunjuk operasional, serta penguatan pelatihan dan pendampingan secara terstruktur.

Berdasarkan ketiga penyataan informan tersebut menunjukan bahwa Ketidakstabilan server menyebabkan pengurus BSU tidak dapat melakukan input transaksi secara tepat waktu, sehingga data timbulan sampah menjadi tidak real-time dan bahkan sebagian menumpuk. Dalam implementasi kebijakan berbasis teknologi, lingkungan teknologi yang tidak stabil memengaruhi kinerja program dan dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap sistem. ketika kejelasan kebijakan tinggi namun kapasitas target rendah sehingga pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai desain awal.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pembahasan

Ketepatan Kebijakan

Menurut kerangka teori implementasi kebijakan Richard Matland (1995), tingkat keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh dua dimensi utama, yaitu tingkat kejelasan tujuan kebijakan (policy ambiguity) dan tingkat konflik di antara aktor implementasi (policy conflict). Dalam konteks Bank Sampah Unit (BSU), terutama dalam implementasi program digital seperti Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM) maupun tata kelola rutin operasional, rendahnya keterampilan sumber daya manusia menjadi faktor signifikan yang mencerminkan adanya tingkat kejelasan kebijakan yang tidak memadai. Ketika SDM tidak memiliki kapasitas yang memadai, maka pesan kebijakan, prosedur, serta standar operasional yang sebenarnya telah dirancang jelas oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak dapat diterjemahkan dengan tepat oleh pelaksana di tingkat unit. Kondisi ini menyebabkan ambiguitas implementasi, di mana pelaksana tidak sepenuhnya memahami bagaimana program harus dijalankan secara teknis

Selain itu, rendahnya kompetensi SDM juga berdampak pada ketidakmampuan BSU dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Matland menegaskan bahwa implementasi akan efektif ketika pelaksana memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas tanpa interpretasi yang menyimpang. Di BSU, interpretasi yang keliru sering muncul karena petugas membuat keputusan berbasis pengalaman personal ketimbang memahami instruksi formal yang telah disusun DLH. Kondisi ini memperbesar tingkat *ambiguity in means*, yaitu ketidakjelasan terkait *bagaimana* kebijakan harus dijalankan. Pada titik ini, pelaksana cenderung menjalankan kegiatan secara improvisatif yang mengurangi ketepatan tujuan program, sehingga program bank sampah tidak memberikan hasil optimal meskipun telah difasilitasi oleh kebijakan dan dukungan pemerintah.

Ketepatan Pelaksanaan

Implementasi kebijakan Richard Matland (1995), ketepatan pelaksanaan merupakan kondisi ketika perilaku para pelaksana kebijakan di tingkat lapangan mampu mencerminkan secara tepat instruksi, prosedur, dan tujuan yang telah dirancang oleh pembuat kebijakan. Ketepatan pelaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh dua variabel utama dalam model Matland, yaitu tingkat kejelasan kebijakan dan kapasitas aktor implementasi. Pada konteks Bank Sampah Unit (BSU), rendahnya keterampilan sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan desain awal, sehingga menurunkan ketepatan pelaksanaan program pengurangan timbulan sampah. Program yang secara normatif telah memiliki pedoman teknis, standar operasional, dan target yang jelas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) justru tidak dapat dijalankan secara akurat di tingkat unit akibat keterbatasan kemampuan pelaksana.

Ketepatan Target

Kerangka implementasi kebijakan Richard Matland (1995), ketepatan target (*target accuracy*) melihat pada sejauh mana tujuan dan sasaran program mampu diwujudkan melalui tindakan implementasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Ketepatan target sangat berkaitan dengan dua dimensi utama, yaitu kejelasan tujuan (*low ambiguity*) dan kemampuan aktor implementasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada konteks Bank Sampah Unit (BSU), rendahnya keterampilan sumber daya manusia menjadi faktor dominan yang menghambat pencapaian target penurunan timbulan sampah. Meskipun DLH telah menetapkan indikator dan target kinerja BSU, seperti peningkatan jumlah nasabah, peningkatan volume

sampah yang dipilah, dan akurasi pelaporan, target tersebut tidak tercapai secara optimal karena pelaksana tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mengimplementasikannya secara konsisten.

Ketepatan Lingkungan

Implementasi kebijakan Richard Matland (1995), ketepatan lingkungan (*contextual appropriateness*) merujuk pada sejauh mana kondisi lingkungan implementasi—baik sosial, administratif, kelembagaan, maupun sumber daya—mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Lingkungan yang tepat seharusnya menyediakan sumber daya yang memadai bagi pelaksana, termasuk infrastruktur, dukungan organisasi, koordinasi antar-aktor, serta kompetensi sumber daya manusia (SDM). Pada kasus Bank Sampah Unit (BSU), rendahnya keterampilan SDM menunjukkan bahwa lingkungan implementasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program, sehingga menghambat efektivitas kebijakan pengurangan timbulan sampah. Dengan demikian, ketidaktepatan lingkungan menjadi salah satu faktor struktural yang berpengaruh terhadap kurang optimalnya program.

Ketidaktepatan lingkungan juga tercermin dari minimnya fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan dari DLH, serta lemahnya budaya kerja di tingkat BSU. Matland menekankan bahwa ketika lingkungan tidak menyediakan dukungan struktural, maka kebijakan meskipun dirancang dengan jelas akan mengalami menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.. Lingkungan yang tidak kondusif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak dijalankan dalam konteks yang tepat, sehingga efektivitasnya menurun.

Ketidaktepatan lingkungan juga berkaitan dengan dinamika sosial dan partisipasi masyarakat. Matland menegaskan bahwa lingkungan implementasi yang efektif harus mencakup aktor yang terlibat secara aktif dan memahami peran masing-masing. Namun di BSU, SDM yang kurang terampil tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan nasabah maupun masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pemilahan sampah. Akibatnya, partisipasi masyarakat rendah dan volume sampah terpilah tidak meningkat secara signifikan. Lingkungan sosial yang tidak mendukung ini memperlemah efektivitas program, menegaskan bahwa ketidakmampuan SDM bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menghambat terciptanya lingkungan implementasi yang kondusif sesuai konsep Matland.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa berbagai temuan yang diperoleh melalui analisis mendalam terhadap kondisi Timbulan sampah diKota Surabaya dengan adanya program SIBASAM. Seluruh proses analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *Teori Richard Matland*, yang menekankan empat elemen utama, yakni *Ketepataan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan*. Temuan-temuan yang disampaikan dalam bagian berikut tidak hanya menggambarkan capaian yang telah diraih, tetapi juga menunjukkan sejumlah tantangan yang masih perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan implementasi Program SIBASAM dalam Upaya penurunan timbulan sampah di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program SIBASAM, dapat disimpulkan bahwa ketidakoptimalan program ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan pada sistem dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikannya. Dari sisi sistem, masih terdapat berbagai kekurangan seperti fitur yang tidak berjalan semestinya, kurangnya integrasi antar modul, serta performa sistem yang belum stabil. Kondisi ini

menghambat kelancaran proses kerja, memperlambat alur pelayanan, serta menyebabkan data tidak dapat dikelola secara efektif.

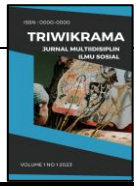
Selain permasalahan teknis, kemampuan SDM dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan sistem juga masih belum memadai. Minimnya pelatihan, pendampingan, serta belum meratanya literasi digital memberikan dampak pada rendahnya pemanfaatan fitur-fitur penting dalam sistem SIBASAM. Akibatnya, proses operasional masih dilakukan secara manual atau tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tujuan program menjadi sulit tercapai secara optimal. Kolaborasi antara sistem yang kurang mendukung dan SDM yang kurang terampil menyebabkan implementasi SIBASAM belum memberikan hasil sesuai harapan. Program sebenarnya memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun pemanfaatannya belum maksimal akibat adanya hambatan teknis maupun non-teknis.

Koordinasi yang lemah antara Dinas Lingkungan Hidup, bank sampah induk, dan bank sampah unit, sehingga proses verifikasi data, persetujuan, dan pencairan BSU tidak berjalan sinkron. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan untuk operator bank sampah menyebabkan banyak fitur SIBASAM tidak digunakan secara optimal, sehingga BSU tidak bisa dihitung otomatis dan masih bergantung pada proses manual. Hal ini berujung pada keterlambatan, ketidakadilan distribusi BSU, hingga munculnya keluhan masyarakat. Terakhir, tidak adanya monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja digital membuat pemerintah tidak dapat mengidentifikasi masalah secara cepat, sehingga perbaikan sistem berjalan lambat. Dengan demikian, kegagalan SIBASAM dalam pelaksanaan BSU lebih banyak disebabkan oleh kombinasi faktor teknis, administratif, dan kelembagaan yang saling terkait

Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang telah dianalisis, sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang diperoleh melalui analisis empat elemen *menurut Teori Implementasi Richard Matland*, bagian ini menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pengelola Bank sampah, serta masyarakat dalam mendorong Program SIBASAM sebagai administrasi digital pada bank sampah. Saran ini disusun secara lebih terarah dengan mempertimbangkan kondisi aktual yang ditemukan dalam penelitian pada masing-masing elemen Matland, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan sampah berbasis digital sebagai berikut :

1. Perbaikan dan pengembangan sistem menjadi prioritas utama. Sistem harus diperbarui agar lebih stabil, responsif, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna. Pengembangan fitur tambahan, perbaikan bug, peningkatan keamanan data, serta integrasi dengan aplikasi lain yang relevan perlu dilakukan agar sistem dapat bekerja secara menyeluruh dan mendukung semua kebutuhan operasional.
2. Peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan teknis dan non-teknis harus diberikan secara berkala, baik dalam bentuk workshop, pendampingan langsung, maupun modul pembelajaran mandiri. Program pelatihan ini harus memastikan bahwa setiap pengguna memahami fungsi sistem, mampu menjalankan tugas sesuai prosedur digital, dan dapat mengatasi kendala dasar secara mandiri.
3. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program SIBASAM. Evaluasi ini meliputi kinerja sistem, pemanfaatan fitur, tingkat kepuasan pengguna, serta efektivitas penerapan SOP. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pihak pengelola dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat dan menentukan langkah perbaikan yang tepat.
4. Dukungan manajemen berupa kebijakan yang mendorong penggunaan sistem secara konsisten. Penyediaan fasilitas pendukung seperti jaringan internet yang stabil, perangkat kerja yang memadai, serta tim teknis yang siap membantu juga akan meningkatkan kelancaran operasional program.



DAFTAR PUSTAKA

Agustino Ph.D, L. (2022). *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (Edisi Revisi ke-2)*. ALFABETA, cv.

Aji Dedi Mulawarman, Novrida Qudsi Lutfillah, Febrina Nur Ramadhani, & Meryana Ananda. (2022).

Aplikasi Sistem Informasi Bank Sampah: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, *5*(3), 273–284. https://doi.org/10.33795/jraam.v5i3.002

Bps. (2024). *Statistics Surabaya Municipality Kota Surabaya Dalam Angka*.

Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.

Dharma, A. B., Susanti, D., & Marlinda, P. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen

Bank Sampah Di Kota Dumai. *Sebatik*, *27*(1), 145–154. https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2098

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M. A. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 188. http://eprints.umpo.ac.id/10663/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf

Faisol. N, H. (2025). *Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Penghematan Polusi plastik*.

Hariyadi, K. R., & Nurhascaryani, P. (2025). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA*. 1–17.
Hermaliani, E. H., Andre, M., Akbar, M. Al, Adityo, S., & Hasanah, R. L. (2023). Implementasi Sistem

Informasi Untuk Manajemen Pengolahan Bank Sampah Organik Dan Sampah Non Organik. *Literasi: Jurnal*

Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi, *3*(1), 88–96. https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.795

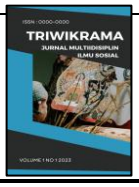
Ishimura, Y., Shinkuma, T., Takeuchi, K., & Hosoda, E. (2024). The effects of regional goal setting on household waste. *Ecological Economics*, *215*, 108015. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2023.108015
Kartini, K. S., Saraswati, N. W. S., Sandhiyasa, I. M. S., Putra, I. N. T. A., & Pramest, N. L. G. S. (2023).

Pendampingan Dan Pelatihan Sistem Informasi Bank Sampah Di Tps 3R Bawana Lestari Desa Pangkungkarung. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 88–92. https://doi.org/10.59458/jwl.v3i2.62

Kemenlh. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional*. https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/capaian

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *5*(2), 145–174. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242

Pemkot Surabaya, D. K. dan P. S. (2024). *Profil Perkembangan Administrasi Kependudkan Kota Sby 2024*. 71.



Purwanti, I. (2021). Konsep implementasi ekonomi sirkular dalam program bank sampah (Studi kasus: Keberlanjutan bank sampah Tanjung). *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *4*(1), 89–98. https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/40/55

Rahayu, P. C., Simatupang, V. S. U., & Christiani, A. (2023). Development of a Web-Based Information System for Waste Banks in South Tangerang. *FaST-Jurnal Sains Dan Teknologi*, *7*(1).

Ramadhan, F. R. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Provinsi Jawa Timur)*.

Sastra, I., Aziz, P., Aini, M. N., Prasetya, B. D., Majapahit, U. I., & Timur, J. (2025). *Manajemen Pengelolaan Sampah : Panduan Pengelolaan Sampah Berbasis Digital Upaya Menuju Desa Sidomulyo Yang Bebas Sampah*. 87–92.